



**Juhanperak**  
**e-issn : 2722-984X**  
**p-issn : 2745-7761**

## **PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**KEKE HASMITA**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas,  
Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.  
email: [Keke.hasmita.kh@gmail.com](mailto:Keke.hasmita.kh@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine whether public accountability partially has a significant effect on managerial performance in the Regional Organization of the Kuantan Singingi Regency. To find out whether the clarity of the budget target partially has a significant effect on managerial performance in the Kuantan Singingi District Apparatus Organization (OPD) and to find out whether public accountability and clarity of the budget target simultaneously have a significant effect on managerial performance in the Kuantan Singingi District Apparatus Organization (OPD) . This research was conducted using a purposive sampling method, where samples were taken based on certain criteria. The sample in this study were agencies and offices located in Kuantan Singingi Regency. The research data was obtained from distributing questionnaires. This research is a quantitative descriptive study with a correlational approach. Analysis of the data used in this study is a multiple linear regression test using the t test and the coefficient of determination test. The results of the study concluded that public accountability partially has a significant effect on the managerial performance of the Regional Organization of the Kuantan Singingi District. Clarity of budget targets partially has a significant effect on the managerial performance of the Kuantan Singingi District Apparatus Organization (OPD). Public accountability, the clarity of budget targets simultaneously has a significant effect on the managerial performance of the Kuantan Singingi District Organization.*

**Keywords:** *Public Accountability, Clarity of Budget Objectives, Managerial Performance, Regional Organizations (OPD)*

### **ABSTRAK**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk mengetahui apakah kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi dan untuk mengetahui apakah akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, dimana sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu. Sampel dalam*

*penelitian ini adalah badan dan dinas yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Data penelitian ini diperoleh dari menyebarkan kuesioner. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linear berganda menggunakan uji t dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi. Kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi. Akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.*

***Kata Kunci: Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Manajerial, Organisasi Perangkat Daerah (OPD).***

## **1. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dengan berdasarkan undang-undang tersebut juga telah melahirkan nuansa baru yaitu pergeseran kewenangan pemerintah yang sentralis birokratik ke pemerintah yang desentralik partipatoris (Mardiasmo, 2009:4). Organisasi pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya pemberlakuan sistem desentralisasi pada tata pemerintahan dalam era otonomi daerah.

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian yang baik pada pemerintah tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka.

Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial. Menurut Bastian (2011:28) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Menurut Mahoney et. al (1963) dalam Putra (2013:2) kinerja manajerial merupakan suatu kinerja individu dalam kegiatan-kegiatan manajerial, seperti

perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negosiasi, perwakilan dan kinerja secara keseluruhan. Kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah, akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2009:20).

Alasan memilih Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai objek penelitian ini karena saat ini nilai Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kuantan Singingi hanya berada pada nilai 51,62 atau nilai “CC” dari KemenPAN-RB (Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018). Ini dikarenakan dengan adanya temuan masalah yang terkait kelemahan pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu: (1) penatausahaan kas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kurang memadai, (2) aset tidak diyakini kewajarannya, (3) penatausahaan dan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Keadaan ini membuktikan bahwa kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi belum sesuai dengan harapan. Selain itu permasalahan yang lain terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: (1) lambatnya pengesahan APBD dan (2) tingkat kedisiplinan ASN masih rendah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang diwujudkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi”**.

## **2.1. LANDASAN TEORI**

### **2.1.1 Definisi Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan meningkatkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut

### **2.1.2 Kejelasan Sasaran Anggaran**

Penyusunan anggaran publik merupakan suatu proses yang cukup rumit. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor privat. Anggaran pada sektor privat merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik.

Sebaliknya pada sektor publik, anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan untuk mendapat masukan (Asrini, 2017:53).

### **2.1.3 Kinerja Manajerial**

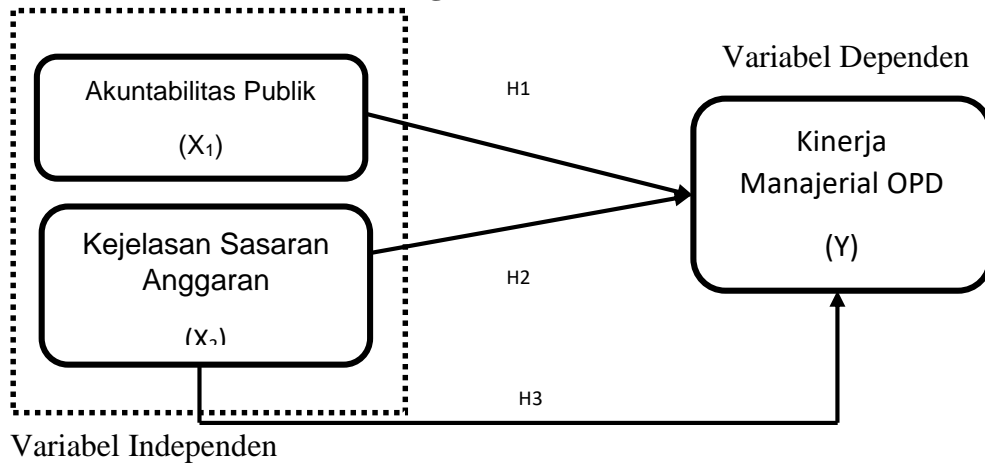
Menurut Mahoney, *et.al* (1963) dalam Wahyuni (2014) kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, yang diukur dengan menggunakan indikator:

1. Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan yang akan datang. Perencanaan bertujuan untuk memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan tujuan, kebijakan, prosedur, penganggaran dan program kerja sehingga terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan pencatatan, pembuatan laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya pengukuran hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Pengkoordinasian merupakan proses jalinan kerjasama dengan bagian-bagian lain dalam organisasi melalui tukar- menukar informasi yang dikaitkan dengan penyesuaian program-program kerja.
3. Koordinasi, menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan.
4. Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pimpinan terhadap rencana yang telah dibuat, dan ditujukan untuk menilai pegawai dan catatan hasil kerja sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang diperlukan.
5. Pengawasan, yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan dilaporkan.
6. Pemilihan staff, yaitu memelihara dan mempertahankan bawahan dalam suatu unit kerja, menyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan mempromosikan pekerjaan tersebut dalam unitnya atau unit kerja lainnya.
7. Negoisasi, yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal pembelian, penjualan atau kontrak untuk barang-barang dan jasa.
8. Perwakilan, yaitu menyampaikan informasi tentang visi, misi, dan kegiatan- kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnis dan konsultasi dengan kantor-kantor lain.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Berikut ini kerangka penelitian yang menggambarkan hubungan pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial organisasi perangkat daerah yaitu sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Penelitian**



### 2.3 *Hipotesis*

Berdasarkan kerangka penelitian diatas, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- H1 : Akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.
- H2 : Kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.
- H3 : Akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 *Rancangan Penelitian*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Arikunto (2010:12) “Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Selain data yang berupa angka, dalam penelitian kuantitatif juga ada data berupa informasi kualitatif”.

Pendekatan dalam penelitian yang digunakan adalah pendekatan korelasional. Pendekatan korelasional adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih dari variabel yang akan diukur. Dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

### 3.2 *Teknik Pengumpulan Data*

Untuk memperoleh sejumlah data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi, menurut Usman (2014:52), observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian penulis melakukan pengamatan atau terjun ke lapangan secara langsung ke lokasi penelitian.
- b. Angket/kuesioner, menurut Riduwan (2012:25), kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawab sesuai dengan alternatif jawaban yang ada.

### **3.3 Analisis Data**

#### **3.3.1 Statistik Deskriptif**

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas data dengan uji reabilitas dan validitas serta uji asumsi klasik (meliputi uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokolerasi dan normalitas). Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS (*Statistical Package For Social Science*) versi 21.00.

#### **3.3.2 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residu berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residu adalah uji parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Jika signifikan pada uji ini lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  berarti data berdistribusi dengan normal

#### **3.3.3 Uji Multikolinieritas**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika ada, maka berarti terdapat multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. Multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat besaran VIF (*varians inflation factor*) dan nilai Tolerance. Jika nilai VIF  $> 10$  atau nilai *Tolerance*  $< 0,10$ , berarti terdapat multikolinieritas (Ghozali, 2011:137).

#### **3.3.4 Uji Heteroskedastisitas**

Tujuan uji ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat *scatterplots*. jika membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas, sedangkan jika titik-titik tersebut menyebar secara tidak teratur

(pola tidak jelas) diatas dan dibawah nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.3.5. *Uji Autokorelasi*

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode ke t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, berarti terdapat autokorelasi. Autokorelasi sering muncul pada data *time series*. Untuk mendeteksi Autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat angka Durbin Watson (DW test). Secara umum dapat diambil patokan :

Jika DW dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif

Jika DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi

Jika DW diatas +2, berarti terdapat autokorelasi negatif.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 *Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial.*

Hasil uji pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah menunjukkan bahwa secara parsial Akuntabilitas Publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas t hitung diperoleh sebesar 1.247 dengan probabilitas sigsifikasi sebesar 0,016 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya Akuntabilitas Publik dimiliki oleh Pemerintah Daerah berperan dalam meningkatkan Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Adanya akuntabilitas publik, maka pelaksanaan kebijakan yang dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat. Artinya proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan yang dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat luas akan sesuai dengan realisasinya bagi kepentingan publik. Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa penggunaan anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan publik, pelaksanaan program-program APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, anggaran yang diusulkan mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil yang diterapkan, pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-proses dan prosedur yang berlaku, dan audit kepatuhan dilakukan agar setiap penggunaan dana dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fakhri (2011) dan Citra (2000) dan juga sejalan dengan penelitian Asrini yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah.

### 4.2 *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial.*

Hasi uji Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan bahwa secara parsial Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas  $t$  hitung diperoleh sebesar 2.950 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,044 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima, artinya kejelasan Sasaran Anggaran berperan dalam meningkatkan kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Adanya kejelasan sasaran dapat memahami apa yang harus dilakukan dalam pekerjaan, dapat memahami bagaimana kinerja diukur, dapat memiliki sasaran yang jelas yang akan membantu dalam melakukan pekerjaan, mempunyai batas waktu untuk mencapai sasaran pekerjaan, mempunyai lebih dari sasaran untuk dicapai dan mengetahui mana yang paling penting dan kurang penting, serta dapat bekerja sama untuk mencapai sasaran pekerjaan, mempunyai lebih dari satu sasaran untuk dicapai dan mengetahui mana yang paling penting, sasaran dalam pekerjaan cukup menantang, dan di dalam instansi tim dapat bekerja sama untuk mencapai sasaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dermawan (2016) dan Putra (2013) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah.

### ***4.3 Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial***

Secara simultan variabel Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji ANOVA atau  $F$  test, didapat nilai  $F$  hitung sebesar 16,043 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  diterima, artinya Akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Adanya kinerja manajerial berperan dalam penentuan tujuan, kebijakan rencana kegiatan seperti penjadwalan kerja, penyusunan anggaran dan penyusunan program, berperan dalam pengumpulan dan menyiapkan informasi yang biasanya berbentuk catatan dan laporan, berperan dalam tukar menukar informasi dalam organisasi untuk mengkoordinasikan dan menyesuaikan laporan, berperan dalam mengevaluasi dan menilai rencana kerja laporan kinerja maupun kerja yang diamati pada unit/sub unit, berperan dalam mengarahkan, memimpin dan mengembangkan para bawahan yang ada pada unit/sub unit, berperan dalam melakukan kontrak untuk barang/jasa yang dibutuhkan apada unit/sub unit dengan pihak luar, berperan dalam mewakili organisasi untuk berhubungan dengan pihak lain diluar organisasi, dan berperan dalam mengevaluasi kinerja, dan sasaran kinerja secara menyeluruh.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) diperoleh sebesar 0.300 artinya bahwa 30 % kinerja manajerial dipengaruhi oleh variabel Akuntabilitas Publik dan Kejelasan



Sasaran Anggaran sedangkan sisanya sebesar 70 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model atau persamaan regresi ini.

Anggaran pemerintah atau APBD yang pertanggungjawabannya sangat penting bagi masyarakat dengan adanya akuntabilitas dan kejelasan sasaran anggaran disini diharapkan mampu menjawab kekhawatiran *stakeholder*. Kejelasan sasaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja dan keberhasilan visi dan misi dapat tercapai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Citra (2000) yang mengatakan partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Semarang dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Semarang.

Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan umum lebih dari itu anggaran harus memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsifungsi pemerintah daerah. Dimana dalam hal ini, kejelasan sasaran anggaran akan mendorong manajer lebih efektif dan melakukan yang terbaik dibandingkan dengan sasaran yang tidak jelas. Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.

5. Besarnya pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebesar 30 %.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi penulis hasil penelitian diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang anggaran publik dan meningkatkan kemampuan analisis tentang APBD.
2. Bagi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disarankan agar lebih memperhatikan proses penyusunan anggaran terutama pada kalender penyusunan APBD.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan memasukkan variabel-variabel yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga lebih mencerminkan hasil yang sebenarnya.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi”.

Adapun penulisan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Peneliti menyadari bahwa tidak sedikit kendala yang telah dialami dalam menyusun skripsi ini. Namun, berkat pertolongan dari Allah SWT dan dukungan dari keluarga serta pihak-pihak yang telah membantu, kendala tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih antara lain kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM, Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE.,ME, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I peneliti yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Yul Emri Yulis, SE.,M.Si, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi Sekaligus Pembimbing II peneliti.
4. Bapak Ibu Dosen serta Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama peneliti menuntut ilmu disini hingga selesai.
5. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi sebagai objek penelitian yang telah memberikan Data yang dibutuhkan bagi peneliti.

6. Orang Tuaku Ayahanda Yanfarizal dan Ibunda suhasmi tercinta yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, penuh cinta, semoga penulis mampu menjadi apa yang mereka inginkan.
7. Untuk suami dan anakku tercinta Rado saputra dan Abil Raket Saputra terimakasih kalian berdua penyemangat bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan teman teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas motivasinya selama ini, bahu membahu dan saling membantu satu sama lain terimakasih atas persahabatan kita selama ini, Kampusku dan yang lainnya semoga perjuangan kita ini tidak sia-sia dan pasti akan kita rasakan manfaatnya dikemudian hari. Semoga kita menjadi orang yang sukses dan berbakti kepada negara, Bangsa dan Agama Khususnya Akuntansi Kelas C Angkatan 2015.

Akhir kata penulis mengucapkan Alhamdulillah. Semoga bantuan dan doa yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembacanya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. (Edisi Revisi VI)*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Keempat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bastian, Indra. 2011. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga.
- Iskandar. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta : Gaung Persada Press.
- LAN dan BPKP. 2013. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta:LAN RI.
- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., Purwanugraha, H. A. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : BPF.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo 2011. *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Raba, Manggaukang. 2012. *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Riduwan. 2012. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Rosjidi, 2012. *Teori Akuntansi Tinjauan Konsep dan Stuktur*, Jakarta : FE-UI.

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2013. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta:Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) dan Lukman Offset.
- Usman, Husaini. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi Kedua. Jakarta : Bumi Aksara.
- Aji, Fakhri Sabdanala. 2011. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Wonosobo*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Asrini. 2017. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja SKPD di pemerintah daerah Kota Palu. *Jurnal katalogis*. Vol.5, No.1. Hal.52-58.
- Astini, N. K., Sulindawati, N. L. G. E., Sinarwati, N. K. 2014. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial SKPD di Kabupaten Klungkung. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol.2, No.1
- Darmawan, R. 2016. Pengaruh akuntabilitas publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial di SKPD Kabupaten Bengkalis. *Jom Fekom*. Vol.3, No.1
- Heski, Petriana (2017). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Magelang)*. ISSN: 2407-9189
- Primadana, G. H. M., Yuniarta, G. A., Adiputra, M. P. 2014. Pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD dengan pengawasan internal sebagai variabel pemoderasi (Studi empiris pada pemerintah Kabupaten Badung). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ghanesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 2 No. 12, hal 1-11*.
- Putra, Deki. 2013. *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang*, Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Sumolang, J. H. (2015). *Pengaruh Teknologi Informasi Dan Saling Ketergantungan Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Sebagai Variabel Intervening*. Vol. 2, No. 1.
- Ufairah, Afifah Nur. 2016. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Evaluasi Anggaran, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja*

*Manajerial (Studi Kasus Pada Pemerintahan Provinsi Jambi)*. Jurnal. Universitas Jambi. Vol. 2 No.2, hal 1-11.

Putri, Citra Lardiana. 2010. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kinerja Manajerial Pada SKPD Kota Semarang*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.

Yulianti, Reni. 2014. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan)*. Jurnal. JOM FEKON Vol.1 No.2.